

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah provinsi dan provinsi terbagi atas kabupaten dan kota, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Provinsi Jambi dalam melaksanakan otonomi melakukan upaya peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta memajukan dan pemanfaatan potensi daerah yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan masyarakat Jambi yang berkelanjutan, namun dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut Provinsi Jambi masih terkendala dalam penetapan batas wilayah, pengelolaan sumber daya alam, ketersediaan dan kualitas infrastruktur, pemajuan kebudayaan, dan perlindungan masyarakat hukum adat;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Menjadi Undang-Undang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Jambi;

Mengingat : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai

dengan karakter dan budaya masyarakat Jambi yang khas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Provinsi Jambi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi Jambi adalah Gubernur Provinsi Jambi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jambi.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Jambi adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok warga negara Indonesia yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
7. Budaya Melayu Jambi adalah sebagai seluruh cipta, rasa, dan hasil karya yang tercipta di lingkungan masyarakat melayu Jambi yang mencerminkan kekhasan dan karakter Provinsi Jambi.

8. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

Pengaturan Undang-Undang ini didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pengaturan dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas::

- a. demokrasi;
- b. kepentingan nasional;
- c. keseimbangan wilayah;
- d. keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
- e. kepastian hukum;
- f. keharmonisan; dan
- g. pelestarian adat listiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

Pasal 4

Pengaturan Provinsi Jambi bertujuan:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis;
- b. mewujudkan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melindungi Masyarakat Hukum Adat dan melestarikan kebudayaan daerah;
- d. meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Provinsi Jambi; dan
- e. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
POSISI, BATAS WILAYAH, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBU KOTA
PROVINSI JAMBI

Pasal 5

- (1) Provinsi Jambi terletak pada posisi:
 - a. 0° (nol derajat) 45' (empat puluh lima menit) - 2° (dua derajat) 45' (empat puluh lima detik) lintang selatan; dan
 - b. 101° (seratus satu derajat) 10' (sepuluh menit) - 104° (seratus empat derajat) 55' (lima puluh lima detik) bujur timur.
- (2) Provinsi Jambi mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Posisi dan Batas wilayah sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 6

- (1) Provinsi Jambi terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten/kota, yaitu:
 - a. Kabupaten Kerinci;
 - b. Kabupaten Bungo;

- c. Kabupaten Merangin;
 - d. Kabupaten Sarolangun;
 - e. Kabupaten Batanghari;
 - f. Kabupaten Muaro Jambi;
 - g. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - h. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - i. Kabupaten Tebo;
 - j. Kota Jambi; dan
 - k. Kota Sungai Penuh.
- (2) Daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ibu Kota Provinsi Jambi berkedudukan di Kota Jambi.

BAB III

KARAKTERISTIK PROVINSI JAMBI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Provinsi Jambi memiliki karakteristik:

- a. kewilayahan;
- b. sumber daya alam;
- c. Masyarakat Hukum Adat; dan
- d. Budaya Melayu Jambi.

Bagian Kedua

Kewilayahan

Pasal 9

Karakter kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa 7 (tujuh) ciri geografi utama yaitu:

- a. kawasan dataran rendah berada di wilayah timur sampai tengah;
- b. kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami yaitu Gunung Kerinci;
- c. 4 (empat) taman nasional yaitu Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kawasan Taman Nasional Berbak, Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Kawasan Taman Nasional Bukit Dua belas;
- d. Sungai Batanghari sebagai sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera;
- e. Danau Gunung Tujuh di kawasan Gunung Kerinci sebagai salah satu danau tertinggi di Indonesia; dan
- f. Geopark Merangin sebagai warisan alam geologi.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Alam

Pasal 10

Karakteristik sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa hasil tambang, perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Bagian Keempat

Masyarakat Hukum Adat

Pasal 11

- (1) Pemerintahan Provinsi Jambi mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai karakteristik Provinsi Jambi yang harus dilestarikan secara berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Suku bangsa yang terdapat di Provinsi Jambi meliputi Suku Melayu Jambi, Suku Anak Dalam, Suku Ulu, dan Suku Kerinci yang merupakan unsur utama Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi.
- (2) Selain suku bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat suku bangsa pendatang dari luar Provinsi Jambi.
- (3) Keberadaan suku bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan unsur kekuatan sosial dalam pembangunan dan memperkuat karakter dan kekhasan Provinsi Jambi.

Bagian Kelima

Budaya Melayu Jambi

Pasal 13

Budaya Melayu Jambi merupakan salah satu ciri dan jati diri masyarakat Jambi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi bertanggung jawab melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Budaya Melayu Jambi.
- (2) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Budaya Melayu Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjaga dan melestarikan adat istiadat, tradisi, dan Budaya Melayu Jambi;
 - b. menghidupkan dan melaksanakan Budaya Melayu Jambi sebagai identitas dan jati diri masyarakat Melayu Jambi;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya daerah;
 - d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mencintai Budaya Melayu Jambi; dan
 - e. mempromosikan Budaya Melayu Jambi.

Pasal 15

- (1) Pelindungan Budaya Melayu Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi objek budaya
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. publikasi.
- (2) Pengembangan Budaya Melayu Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengakajian; dan
 - c. pengayaan.
- (3) Pemanfaatan Budaya Melayu Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter masyarakat Jambi;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memperkenalkan Budaya Melayu Jambi.

Pasal 16

Dalam hal Budaya Melayu Jambi meliputi:

- a. sejarah Melayu Jambi;
- b. adat Melayu Jambi;
- c. cagar budaya;
- d. bahasa Melayu Jambi;
- e. kesenian;
- f. makanan dan minuman tradisional; dan
- g. pakaian tradisional Melayu Jambi.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI

Pasal 17

Pemerintahan Provinsi Jambi dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jambi berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Provinsi Jambi berwenang untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

BAB V

PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Pengakuan dan Pencabutan Hak Ulayat

Pasal 20

- (1) Pemerintahan Provinsi Jambi mengakui keberadaan hak ulayat yang dimiliki, ditempati, dan dikelola secara turun termurun oleh kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Provinsi Jambi.

- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan mendapat pengakuan yang ditetapkan dengan Perda Provinsi Jambi.

Pasal 22

- (1) Pemerintahan Provinsi Jambi dapat melakukan evaluasi terhadap pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkannya pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dan berikutnya akan dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Pemerintahan Provinsi Jambi melakukan evaluasi atas pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (4) Dalam hal hak ulayat yang telah dievaluasi tidak memenuhi kriteria dan persyaratan, pengakuan atas hak ulayat dicabut dengan Perda Provinsi Jambi.

Bagian Kedua

Pemuliaan Adat dan Budaya Jambi

Pasal 23

- (1) Pemuliaan adat dan Budaya Melayu Jambi dilakukan untuk menempatkan adat dan budaya sebagai bentuk peradaban Jambi yang unggul dan dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat Jambi secara terus menerus.
- (2) Pemuliaan adat dan Budaya Melayu Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya pengembangan adat dan Budaya

Melayu Jambi yang dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang mengedepankan prinsip kesejahteraan dan keadilan.

- (3) Pengembangan adat dan Budaya Melayu Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.
- (4) Pengembangan adat dan Budaya Melayu Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masyarakat Jambi secara holistik dari hulu sampai ke hilir yang meliputi adat, tradisi, seni dan budaya, kearifan lokal, serta warisan budaya.

Pasal 24

- (1) Untuk mewujudkan pemuliaan adat dan budaya Melayu Jambi dalam kehidupan masyarakat Jambi, Pemerintahan Provinsi Jambi menetapkan Perda Provinsi Jambi.
- (2) Perda Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur:
 - a. batas-batas administrasi wilayah adat;
 - b. pemuliaan adat dan budaya;
 - c. pengembangan adat dan budaya;
 - d. pemberdayaan dan pelestarian adat dan budaya;
 - e. lembaga adat;
 - f. majelis adat;
 - g. tata hubungan dan kerja sama antarlembaga adat di Jambi;
 - h. tata hubungan lembaga-lembaga adat dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi;
 - i. pembangunan kawasan adat dan budaya di Jambi
 - j. pariwisata berbasis adat dan budaya di Jambi; dan
 - k. kerjasama dengan pihak ketiga dari dalam negeri atau luar negeri.

Bagian Ketiga

Lembaga Adat dan Budaya Jambi

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pengembangan dan pemuliaan adat dan budaya Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan lembaga adat masyarakat Jambi.
- (2) Lembaga adat masyarakat Jambi berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
- (3) Kepengurusan lembaga adat masyarakat Jambi berada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan/atau desa/kelurahan.
- (4) Lembaga adat masyarakat Jambi bertugas:
 - a. menggali dan mengembangkan adat istiadat dan Budaya Melayu Jambi dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah Melayu Jambi;
 - b. mendukung pengelolaan adat istiadat dan Budaya Melayu Jambi, memberi penganugerahan gelar dan penghargaan, dan memberi sanksi atas pelanggaran aturan hukum dan nilai adat Melayu Jambi;
 - c. menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan perkara adat; dan
 - d. menginventarisasi, mengurus, memelihara, dan mengamankan serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat Jambi.
- (5) Lembaga adat masyarakat Jambi memiliki fungsi:
 - a. berperan secara aktif dan bekerjasama dengan pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat Jambi, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan agamis, menjaga kedamaian, mendorong penyelesaian infrastruktur, mendukung upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
 - b. bekerjasama dengan pemerintahan mempertahankan hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan hutan milik masyarakat adat Jambi lainnya; dan
 - c. membantu menyelesaikan permasalahan konflik pertanahan dari sisi hak ulayat dan adat yang berlaku di wilayah setempat.
- (6) Penetapan Lembaga adat masyarakat Jambi ditetapkan dalam Perda Provinsi Jambi.

Bagian Keempat

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Jambi

Pasal 26

- (1) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Jambi merupakan keputusan tertulis yang diberikan oleh negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat Jambi beserta seluruh hak dan identitas yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat Jambi.
- (2) Pengakuan kepada Masyarakat Hukum Adat Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. hak menempati tanah ulayat dan hak pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat Jambi;
 - b. penetapan batas wilayah yang jelas;
 - c. penegakan sanksi atas tanah ulayat dan hak pemanfaatan tanah adat;
 - d. infrastruktur yang sesuai dengan kearifan lokal; dan
 - e. perolehan hak kependudukan, hak pendidikan, dan hak-hak dasar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintahan Provinsi Jambi melestarikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Masyarakat Hukum Adat Jambi.
- (4) Pemerintahan Provinsi Jambi bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Jambi.
- (5) Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda Provinsi Jambi.

Pasal 27

- (1) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi dan validasi; dan
 - c. penetapan.
- (2) Tahapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Administrasi Kependudukan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi Jambi wajib memenuhi hak atas administrasi kependudukan bagi Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi.
- (2) Guna terpenuhinya hak atas administrasi kependudukan bagi Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi wajib melakukan pendataan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara administrasi kependudukan masyarakat hukum adat di Provinsi Jambi diatur dalam Perda Provinsi Jambi.

Pasal 29

- (1) Bagi Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi yang tinggal tidak menetap pada suatu wilayah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi wajib berkoordinasi dengan ketua adat setempat atau nama lain guna terpenuhinya pendataan administrasi kependudukan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketua adat setempat atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi jika ada perubahan yang terjadi atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi wajib memberikan fasilitas pelayanan publik kepada Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi baik bagi yang sudah memiliki dokumen kependudukan atau bagi yang belum memiliki dokumen kependudukan.
- (2) Fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;

- b. pendidikan;
- c. pelayanan administrasi kependudukan;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- e. akses sebagai peserta dalam pemilihan umum.

BAB VI

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI

Pasal 31

- (1) Pembangunan di Provinsi Jambi terdiri atas:
 - a. pembangunan jangka panjang;
 - b. pembangunan jangka menengah; dan
 - c. pembangunan tahunan bidang prioritas.
- (2) Pembangunan tahunan bidang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. prioritas pertama yaitu pangan, sandang, dan papan;
 - b. prioritas kedua yaitu kesehatan dan pendidikan;
 - c. prioritas ketiga yaitu jaminan sosial dan ketenagakerjaan;
 - d. prioritas keempat yaitu adat, tradisi, seni serta kebudayaan; dan
 - e. prioritas kelima yaitu kepariwisataan dan wilayah pesisir.
- (3) Bidang prioritas pembangunan di Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jambi dilaksanakan dengan pendekatan:
 - a. holistik;
 - b. integratif;
 - c. perencanaan yang sinergis;
 - d. kepemimpinan kultural; dan
 - e. pendekatan satu kesatuan wilayah; dan
 - f. berkelanjutan.

- (2) Pendekatan holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembangunan seluruh wilayah Provinsi Jambi secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
- (3) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendekatan pembangunan yang diselenggarakan melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
- (4) Pendekatan perencanaan yang sinergis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menempatkan Pemerintah Provinsi Jambi lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator daripada sebagai operator langsung.
- (5) Pendekatan kepemimpinan kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penerapan kepemimpinan yang lebih mengedepankan nilai budaya dan kearifan lokal agar dapat mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara aspiratif, demokratis, efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- (6) Pendekatan satu kesatuan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendekatan pembangunan yang mencakup satu daerah provinsi, satu pola, dan satu tata kelola.
- (7) Pendekatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Pasal 33

Untuk mendukung pembangunan 5 (lima) bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan

infrastruktur darat, infrastruktur laut dan infrastruktur udara secara terintegrasi dan terkoneksi.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

Pasal 34

- (1) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah Provinsi Jambi didasarkan pada karakteristik potensi dan daya dukung kabupaten/kota.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah Provinsi Jambi di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. wilayah pertanian;
 - b. wilayah perkebunan;
 - c. wilayah pertambangan;
 - d. wilayah kelautan;
 - e. wilayah kehutanan;
 - f. wilayah pariwisata; dan
 - g. wilayah pesisir.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.
- (4) Kabupaten/kota yang menjadi kawasan pengelolaan dan pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan insentif berupa tambahan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan potensi daerah dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Perda Provinsi Jambi.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelolaan dan pengembangan potensi daerah Provinsi Jambi secara wilayah dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bagi pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi dilakukan secara seimbang dan bertumpu pada:
 - a. bidang pertanian;
 - b. bidang perkebunan;
 - c. bidang pertambangan;
 - d. bidang kelautan, perikanan, serta pesisir;
 - e. bidang industri berbasis budaya berciri khas Jambi; dan
 - f. bidang kepariwisataan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bagi pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperkuat dan menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Jambi.

Pasal 37

- (1) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

- (2) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menuju sistem pertanian organik dalam rangka mewujudkan pembangunan Jambi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menuju sistem perkebunan organik dalam rangka mewujudkan pembangunan Jambi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah dan memperhatikan keseimbangan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang kelautan, perikanan, dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d diorientasikan pada budidaya laut, pemenuhan kebutuhan lokal, dan ekspor.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang kelautan, perikanan, dan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah dan memperhatikan keseimbangan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pasal 41

- (1) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang industri berbasis budaya berciri khas Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor.
- (2) Industri berbasis budaya berciri khas Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri pangan, industri sandang, dan industri kerajinan rakyat.
- (3) Industri pangan, industri sandang, dan industri kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah dan memperhatikan keseimbangan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pasal 42

- (1) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f diarahkan pada pengembangan kepariwisataan:
 - a. berbasis budaya;
 - b. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya;
 - c. berbasis kerakyatan;
 - d. berorientasi pada kualitas;
 - e. ramah lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata;
 - d. sumber daya manusia pariwisata; dan
 - e. kelembagaan pariwisata.

- (3) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang kepariwisataan diselenggarakan:
 - a. sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. memperhatikan keseimbangan wilayah; dan
 - c. sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dengan memperhatikan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengembangkan kawasan ekonomi secara terintegrasi di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan kawasan ekonomi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda Provinsi Jambi.

BAB VIII

PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 44

- (1) Personal Pemerintah Provinsi Jambi meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset dan dokumen pemerintah Provinsi Jambi meliputi:
 - a. barang milik Provinsi Jambi yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Jambi;
 - b. badan usaha milik daerah Provinsi Jambi yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Jambi;

- c. utang piutang Provinsi Jambi; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Jambi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Perda Provinsi Jambi.

BAB IX

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 45

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Jambi, pemerintah daerah perlu mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah diseluruh kabupaten dan kota.
- (2) SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk:
- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
 - b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan produktifitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
 - d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
 - f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan; dan
 - h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Jambi.

Pasal 46

- (1) Penerapan SPBE di Provinsi Jambi dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- (2) Penerapan SPBE di Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk teknologi informasi komunikasi Provinsi Jambi.
- (3) Rencana induk teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi, serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Jambi.
- (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
 - a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah;
 - b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Jambi;
 - c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
 - d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
 - e. pemutakhiran *big data*.
- (5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi Jambi dalam menerapkan SPBE perlu menyiapkan sumber daya berupa:
 - a. pembiayaan yang cukup;
 - b. infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan
 - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

dipenuhi melalui kerjasama dengan pihak swasta.

- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dalam Perda Provinsi Jambi.

BAB X

PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 49

- (1) Provinsi Jambi berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemuliaan adat dan Budaya Melayu Jambi dan prioritas penyelenggaraan pembangunan Jambi sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perda Provinsi Jambi.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Partisipasi Masyarakat pada pembangunan daerah Provinsi Jambi dilakukan melalui kegiatan organisasi kemasyarakatan, forum komunikasi masyarakat, serta aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- (2) Pemerintahan Provinsi Jambi wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum dan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi; dan
 - c. penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum komunitas masyarakat pada setiap daerah.

Pasal 52

- (1) Masyarakat setiap saat diberi kesempatan untuk mengakses aplikasi mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi.
- (2) Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban mengartikulasi aspirasi dan pengaduan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai Provinsi Jambi,
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 55

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Provinsi Jambi sebagai daerah otonom pada dasarnya merupakan upaya guna mempercepat terwujudnya tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan terbentuknya Provinsi Jambi sebagai daerah otonom, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya untuk dikelola oleh daerah otonom sehingga membantu mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi masyarakat di daerah. Kedudukan Provinsi Jambi sebagai daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) sebagai Undang-Undang.

Pada masa lalu ketiga daerah tersebut terhimpun dalam daerah tingkat I Sumatera Tengah sebagai suatu kesatuan yang otonom, namun atas dasar perkembangan dan beragam tuntutan dari rakyat di daerah-daerah tersebut maka ketiga daerah tersebut meminta kepada pemerintahan pusat untuk masing-masing daerah meningkatkan kedudukannya sebagai daerah tingkat I.

Desain pengaturan Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang tersebut sebenarnya masih bersifat administratif dan tidak diberikan otonomi secara luas. Hal ini dikarenakan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya belum mengenal konsep otonomi daerah, apalagi otonomi luas yang baru dimulai sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentu bisa dipahami karena pada waktu itu pemberian otonomi yang seluas-luasnya dikhawatirkan menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan dan tidak selaras dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberikan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selain itu secara histori, pada masa yang sama pemerintah pusat pada saat itu juga tengah menghadapi berbagai pemberontakan internal di berbagai daerah di Indonesia yang masih berkecamuk sehingga pemberian otonomi yang luas tidak dimungkinkan sesuai dengan situasi dan kondisi negara pada masa tersebut.

Dengan merujuk pada perkembangan ketatanegaraan pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945, maka pengaturan Provinsi Jambi dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau tentunya sudah tidak relevan. Walaupun undang-undang organik dari UUD NRI Tahun 1945 amandemen yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Pemda Tahun 2014 telah menjadi dasar pelaksanaan otonomi pada setiap provinsi, namun ada hal-hal lain yang perlu diatur sesuai dengan aspirasi dari unsur masyarakat Jambi.

Urgensi pembentukan Undang-Undang ini juga dipengaruhi oleh pesatnya dinamika perubahan yang menuntut Provinsi Jambi untuk lebih sigap membangun Provinsi Jambi, namun dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengaturan mengenai Provinsi Jambi tidak bersifat kaku, yang hanya menekankan pendekatan pada hal-hal yang bersifat normatif saja, melainkan harus diberi ruang untuk dapat mengurus dirinya sendiri sesuai dengan potensi daerah dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat dan sesuai dengan kebijakan negara dalam pengaturan desentralisasi. Selain itu, pengaturan Provinsi Jambi dalam Undang-Undang ini, tidak hanya mengatur tentang penyesuaian dasar hukum peraturan perundang-undangan yang melandasi pembentukan Undang-Undang ini saja, melainkan juga mengatur tata kehidupan masyarakat berdasarkan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisionalnya.

Undang-Undang ini mengatur mengenai: posisi, batas wilayah, dan pembagian wilayah, dan ibu kota Provinsi Jambi; karakteristik Provinsi Jambi; pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat; prioritas penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jambi; pengelolaan dan pengembangan potensi daerah; kewenangan pemerintahan Provinsi Jambi; personel, aset, dan dokumen; sistem pemerintahan berbasis elektronik; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan wilayah” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan pada seluruh masyarakat di seluruh wilayah Jambi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi agar terpola, terarah, terintegrasi, dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Jambi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pemerintahan Provinsi Jambi harus dijalankan secara tertib dan taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keharmonisan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi harus semakin mendekatkan nilai-nilai yang menyatukan alam Jambi, masyarakat, dan Masyarakat Hukum Adat Jambi, serta kebudayaan Jambi sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk melindungi dan memperkuat nilai-nilai adat, keragaman suku, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “batas wilayah” adalah garis pemisah antara dua daerah provinsi yang ditentukan dengan patok pembatas dan/atau titik koordinat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “tambang” adalah hasil tambang berupa minyak bumi, gas bumi, dan batubara.

Yang dimaksud dengan “perkebunan” adalah hasil perkebunan berupa kelapa sawit dan karet.

Yang dimaksud dengan “pertanian” adalah hasil pertanian berupa beras kerinci, kentang, kubis, tomat, dan kedelai.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Suku bangsa pendatang antara lain, suku Jawa, suku Mandailing, suku Banjar, suku Bugis, suku Sunda, dan suku Tionghoa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN I

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI JAMBI



LAMPIRAN II

DAFTAR PILAR BATAS JAMBI-BENGKULU

**DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. LEBONG PROVINSI BENGKULU DENGAN
KAB. MERANGIN PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 25 Tahun 2013)**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	Doppler N.1003	2° 46' 06,670" LS	102° 03' 50,000" BT	840702	9693553
2	TK 2	2° 45' 48,200" LS	102° 03' 00,200" BT	839163	9694125
3	TK 3	2° 45' 33,000" LS	102° 02' 08,300" BT	837560	9694596
4	TK 4	2° 45' 08,500" LS	102° 01' 25,200" BT	836229	9695353
5	TK 5	2° 44' 24,400" LS	102° 00' 38,300" BT	834783	9696712
6	TK 6	2° 43' 41,500" LS	102° 00' 01,400" BT	833645	9698034
7	TK 7	2° 43' 28,200" LS	101° 59' 18,300" BT	832314	9698446
8	TK 8	2° 43' 33,100" LS	101° 58' 29,500" BT	830804	9698299
9	TK 9	2° 43' 51,200" LS	101° 57' 57,170" BT	829804	9697745

10	TK 10	2° 43' 53,300" LS	101° 56' 02,300" BT	826252	9697690
11	TK 11	2° 44' 10,200" LS	101° 55' 08,200" BT	824578	9697174

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU DENGAN
KAB. MERANGIN PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 25 Tahun 2013)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 11	2° 44' 10,200" LS	101° 55' 08,200" BT	824578	9697174
2	TK 12	2° 44' 26,300" LS	101° 54' 41,300" BT	823746	9696681
3	TK 13	2° 44' 07,400" LS	101° 53' 45,400" BT	822019	9697266
4	TK 14	2° 44' 08,600" LS	101° 52' 51,200" BT	820343	9697234
5	TK 15	2° 43' 51,600" LS	101° 51' 37,300" BT	818060	9697762

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU DENGAN
KAB. MERANGIN PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 25 Tahun 2013)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 15	2° 43' 51,600" LS	101° 51' 37,300" BT	818060	9697762
2	TK 16	2° 43' 03,300" LS	101° 51' 11,300" BT	817260	9699248
3	TK 17	2° 42' 12,500" LS	101° 50' 45,400" BT	816463	9700812
4	TK 18	2° 42' 55,500" LS	101° 50' 08,300" BT	815313	9699493
5	TK 19	2° 42' 52,300" LS	101° 49' 30,200" BT	814135	9699594
6	PBU 1	2° 41' 23,000" LS	101° 48' 44,000" BT	812713	9702342
7	PBU 2	2° 40' 25,000" LS	101° 48' 32,000" BT	812346	9704126
8	PBU 3	2° 40' 03,000" LS	101° 47' 43,000" BT	810833	9704806
9	PBU 4	2° 39' 19,000" LS	101° 47' 04,000" BT	809631	9706161
10	PBU 5	2° 38' 43,000" LS	101° 46' 09,000" BT	807933	9707272
11	PBU 6	2° 37' 54,000" LS	101° 45' 38,000" BT	806978	9708780
12	PBU 7	2° 37' 14,000" LS	101° 45' 06,000" BT	805991	9710012
13	PBU 8	2° 36' 36,000" LS	101° 44' 07,000" BT	804170	9711184
14	PBU 9	2° 36' 00,000" LS	101° 43' 50,000" BT	803647	9712291
15	PBU 10	2° 35' 19,000" LS	101° 43' 26,000" BT	802908	9713553
16	PBU 11	2° 34' 48,000" LS	101° 42' 47,000" BT	801704	9714509
17	PBU 12	2° 33' 45,000" LS	101° 42' 01,000" BT	800286	9716448
18	PBU 13	2° 33' 08,000" LS	101° 41' 34,000" BT	799454	9717587
19	PBU 14	2° 32' 30,000" LS	101° 41' 00,000" BT	798405	9718758
20	PBU 15	2° 31' 45,000" LS	101° 40' 16,000" BT	797048	9720144
21	PBU 16	2° 31' 54,000" LS	101° 39' 08,000" BT	794945	9719871
22	PBU 17	2° 32' 09,360" LS	101° 38' 57,720" BT	794627	9719400
23	PBU 18	2° 32' 25,920" LS	101° 38' 08,760" BT	793112	9718894
24	PBU 19	2° 32' 57,720" LS	101° 36' 33,720" BT	790172	9717922
25	PBU 20	2° 32' 08,580" LS	101° 36' 14,880" BT	789593	9719434
26	PBU 21	2° 32' 08,880" LS	101° 35' 25,920" BT	788080	9719428
27	PBU 22	2° 32' 33,720" LS	101° 34' 57,720" BT	787206	9718666
28	PBU 23	2° 33' 16,560" LS	101° 34' 08,760" BT	785690	9717352
29	PBU 24	2° 34' 14,700" LS	101° 33' 52,560" BT	785186	9715567
30	PBU 25	2° 34' 12,100" LS	101° 32' 32,080" BT	782699	9715651
31	PBU 26	2° 32' 25,920" LS	101° 32' 46,380" BT	783147	9718914
32	PBU 27	2° 31' 33,720" LS	101° 32' 52,540" BT	783341	9720518
33	PBU 28	2° 30' 38,940" LS	101° 32' 58,800" BT	783537	9722201
34	PBU 29	2° 29' 52,860" LS	101° 33' 04,200" BT	783707	9723617
35	PBU 30	2° 29' 00,060" LS	101° 33' 11,700" BT	783942	9725239
36	PBU 31	2° 27' 57,720" LS	101° 33' 16,560" BT	784096	9727155
37	PBU 32	2° 27' 06,480" LS	101° 33' 24,960" BT	784359	9728729

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU DENGAN
KAB. MERANGIN PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 25 Tahun 2013)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 15	2° 43' 51,600" LS	101° 51' 37,300" BT	818060	9697762
2	TK 16	2° 43' 03,300" LS	101° 51' 11,300" BT	817260	9699248
3	TK 17	2° 42' 12,500" LS	101° 50' 45,400" BT	816463	9700812
4	TK 18	2° 42' 55,500" LS	101° 50' 08,300" BT	815313	9699493
5	TK 19	2° 42' 52,300" LS	101° 49' 30,200" BT	814135	9699594
6	PBU 1	2° 41' 23,000" LS	101° 48' 44,000" BT	812713	9702342
7	PBU 2	2° 40' 25,000" LS	101° 48' 32,000" BT	812346	9704126
8	PBU 3	2° 40' 03,000" LS	101° 47' 43,000" BT	810833	9704806
9	PBU 4	2° 39' 19,000" LS	101° 47' 04,000" BT	809631	9706161
10	PBU 5	2° 38' 43,000" LS	101° 46' 09,000" BT	807933	9707272
11	PBU 6	2° 37' 54,000" LS	101° 45' 38,000" BT	806978	9708780
12	PBU 7	2° 37' 14,000" LS	101° 45' 06,000" BT	805991	9710012
13	PBU 8	2° 36' 36,000" LS	101° 44' 07,000" BT	804170	9711184
14	PBU 9	2° 36' 00,000" LS	101° 43' 50,000" BT	803647	9712291
15	PBU 10	2° 35' 19,000" LS	101° 43' 26,000" BT	802908	9713553
16	PBU 11	2° 34' 48,000" LS	101° 42' 47,000" BT	801704	9714509
17	PBU 12	2° 33' 45,000" LS	101° 42' 01,000" BT	800286	9716448
18	PBU 13	2° 33' 08,000" LS	101° 41' 34,000" BT	799454	9717587
19	PBU 14	2° 32' 30,000" LS	101° 41' 00,000" BT	798405	9718758
20	PBU 15	2° 31' 45,000" LS	101° 40' 16,000" BT	797048	9720144
21	PBU 16	2° 31' 54,000" LS	101° 39' 08,000" BT	794945	9719871
22	PBU 17	2° 32' 09,360" LS	101° 38' 57,720" BT	794627	9719400
23	PBU 18	2° 32' 25,920" LS	101° 38' 08,760" BT	793112	9718894
24	PBU 19	2° 32' 57,720" LS	101° 36' 33,720" BT	790172	9717922
25	PBU 20	2° 32' 08,580" LS	101° 36' 14,880" BT	789593	9719434
26	PBU 21	2° 32' 08,880" LS	101° 35' 25,920" BT	788080	9719428
27	PBU 22	2° 32' 33,720" LS	101° 34' 57,720" BT	787206	9718666
28	PBU 23	2° 33' 16,560" LS	101° 34' 08,760" BT	785690	9717352
29	PBU 24	2° 34' 14,700" LS	101° 33' 52,560" BT	785186	9715567
30	PBU 25	2° 34' 12,100" LS	101° 32' 32,080" BT	782699	9715651
31	PBU 26	2° 32' 25,920" LS	101° 32' 46,380" BT	783147	9718914
32	PBU 27	2° 31' 33,720" LS	101° 32' 52,540" BT	783341	9720518
33	PBU 28	2° 30' 38,940" LS	101° 32' 58,800" BT	783537	9722201
34	PBU 29	2° 29' 52,860" LS	101° 33' 04,200" BT	783707	9723617
35	PBU 30	2° 29' 00,060" LS	101° 33' 11,700" BT	783942	9725239
36	PBU 31	2° 27' 57,720" LS	101° 33' 16,560" BT	784096	9727155
37	PBU 32	2° 27' 06,480" LS	101° 33' 24,960" BT	784359	9728729

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. MERANGIN PROVINSI JAMBI DENGAN
KAB. MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
(Permendagri Nomor 131 Tahun 2017)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS						KOORDINAT UTM			
		LINTANG				BUJUR		X	Y		
1	N.1003	2°	46'	06,670"	LS	102°	03'	50,000"	BT	173520	9693589
2	TK.5	2°	45'	59,316"	LS	102°	04'	01,072"	BT	173862	9693816
3	TK.4	2°	45'	54,255"	LS	102°	04'	16,213"	BT	174329	9693972
4	TK.3	2°	45'	53,624"	LS	102°	04'	22,876"	BT	174535	9693992

DAFTAR PILAR BATAS JAMBI-SUMSEL

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. SAROLANGUN PROVINSI JAMBI DENGAN
KAB. MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
(Permendagri Nomor 131 Tahun 2017)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	TK.3	2° 45'	53,624" LS	102° 04'	22,876" BT	174535	9693992
2	PBU B.73	2° 44'	19,400" LS	102° 06'	34,000" BT	178582	9696899
3	PBU B.72	2° 43'	21,000" LS	102° 08'	08,100" BT	181486	9698701
4	PBU B.71	2° 42'	25,900" LS	102° 10'	06,400" BT	185140	9700404
5	PBU B.70	2° 42'	09,700" LS	102° 12'	22,700" BT	189352	9700912
6	TK.2	2° 41'	29,451" LS	102° 14'	02,950" BT	192448	9702156
7	TK.1	2° 39'	59,507" LS	102° 14'	35,094" BT	193435	9704923
8	PBU B.69	2° 38'	21,000" LS	102° 14'	58,200" BT	194143	9707952
9	PBU B.68	2° 37'	32,400" LS	102° 17'	00,800" BT	197929	9709455
10	PBU B.67	2° 37'	32,300" LS	102° 17'	11,150" BT	198249	9709458
11	PBU B.66	2° 37'	58,560" LS	102° 17'	53,440" BT	199558	9708654
12	PBU B.65	2° 38'	57,610" LS	102° 18'	18,800" BT	200346	9706841
13	PBU B.64	2° 38'	57,640" LS	102° 18'	52,130" BT	201377	9706842
14	PBU B.63	2° 39'	17,330" LS	102° 19'	09,180" BT	201905	9706238
15	PBU B.62	2° 39'	23,890" LS	102° 20'	03,900" BT	203597	9706040
16	PBU B.61	2° 39'	04,200" LS	102° 20'	28,300" BT	204350	9706647
17	PBU B.60	2° 38'	47,790" LS	102° 20'	58,570" BT	205284	9707153
18	PBU B.59	2° 39'	07,480" LS	102° 21'	42,490" BT	206643	9706551
19	PBU B.58	2° 39'	22,250" LS	102° 22'	22,840" BT	207891	9706100
20	PBU B.57	2° 39'	53,440" LS	102° 22'	36,180" BT	208306	9705142
21	PBU B.56	2° 40'	23,230" LS	102° 23'	31,500" BT	210017	9704230
22	PBU B.55	2° 40'	32,260" LS	102° 23'	47,770" BT	210521	9703953
23	PBU B.54	2° 40'	58,650" LS	102° 23'	43,540" BT	210392	9703142
24	PBU B.53	2° 41'	20,650" LS	102° 24'	20,030" BT	211521	9702468
25	PBU B.52	2° 41'	25,480" LS	102° 25'	04,880" BT	212908	9702323
26	PBU B.51	2° 41'	27,000" LS	102° 25'	22,130" BT	213441	9702277
27	PBU B.50	2° 41'	27,000" LS	102° 25'	58,240" BT	214557	9702280
28	PBU B.49	2° 41'	40,000" LS	102° 26'	11,580" BT	214970	9701881
29	PBU B.48	2° 41'	49,480" LS	102° 26'	46,720" BT	216057	9701592
30	PBU B.47	2° 42'	02,580" LS	102° 27'	01,370" BT	216510	9701190
31	PBU B.46	2° 42'	01,230" LS	102° 27'	29,670" BT	217385	9701233
32	PBU B.45	2° 42'	12,260" LS	102° 27'	52,450" BT	218090	9700896
33	PBU B.44	2° 42'	15,480" LS	102° 28'	08,720" BT	218593	9700798
34	PBU B.43	2° 42'	05,810" LS	102° 28'	27,920" BT	219186	9701096
35	PBU B.42	2° 41'	40,000" LS	102° 29'	49,720" BT	221712	9701895
36	PBU B.41	2° 41'	51,940" LS	102° 29'	15,500" BT	220655	9701526
37	PBU B.40	2° 41'	48,060" LS	102° 29'	36,570" BT	221306	9701646
38	PBU B.39	2° 42'	04,190" LS	102° 29'	53,170" BT	221820	9701152
39	PBU B.38	2° 42'	10,650" LS	102° 30'	25,190" BT	222810	9700955
40	PBU B.37	2° 41'	46,450" LS	102° 30'	40,370" BT	223278	9701700

41	PBU B.36	2° 41'	23,870"	LS	102° 30'	37,460"	BT	223186	9702394
42	PBU B.35	2° 40'	48,390"	LS	102° 31'	21,950"	BT	224559	9703487
43	PBU B.34	2° 40'	45,160"	LS	102° 31'	50,120"	BT	225430	9703588
44	PBU B.33	2° 40'	30,650"	LS	102° 32'	19,830"	BT	226347	9704036
45	PBU B.32	2° 40'	37,100"	LS	102° 32'	54,380"	BT	227415	9703839
46	PBU B.31	2° 40'	48,390"	LS	102° 33'	09,590"	BT	227886	9703493
47	PBU B.30	2° 40'	33,870"	LS	102° 33'	43,140"	BT	228922	9703942
48	PBU B.29	2° 40'	27,420"	LS	102° 34'	15,760"	BT	229929	9704142
49	PBU B.28	2° 40'	41,940"	LS	102° 34'	50,310"	BT	230998	9703698
50	PBU B.27	2° 39'	48,480"	LS	102° 36'	13,740"	BT	233573	9705346
51	PBU B.26	2° 39'	09,790"	LS	102° 36'	56,870"	BT	234904	9706537
52	PBU B.25	2° 38'	07,230"	LS	102° 36'	58,010"	BT	234935	9708460
53	PBU B.24	2° 37'	19,880"	LS	102° 36'	50,940"	BT	234714	9709915
54	PBU B.23	2° 36'	55,260"	LS	102° 37'	28,250"	BT	235865	9710673
55	PBU B.22	2° 37'	12,320"	LS	102° 37'	52,100"	BT	236604	9710150
56	PBU B.21	2° 36'	42,300"	LS	102° 38'	11,330"	BT	237196	9711074
57	PBU B.20	2° 36'	50,140"	LS	102° 38'	41,790"	BT	238138	9710835
58	PBU B 19	2° 36'	46,960"	LS	102° 39'	14,260"	BT	239141	9710934
59	PBU B 18	2° 36'	48,080"	LS	102° 39'	34,370"	BT	239763	9710901
60	PBU B 17	2° 36'	37,700"	LS	102° 40'	00,960"	BT	240584	9711222
61	PBU B 16	2° 36'	32,900"	LS	102° 40'	21,660"	BT	241223	9711370
62	PBU B.15	2° 36'	23,710"	LS	102° 40'	31,300"	BT	241521	9711653
63	PBU B.14	2° 36'	04,760"	LS	102° 40'	31,680"	BT	241531	9712236
64	PBU B.13	2° 35'	48,300"	LS	102° 40'	31,450"	BT	241523	9712741
65	PBU B.12	2° 35'	37,020"	LS	102° 40'	38,400"	BT	241737	9713088
66	PBU B.11	2° 35'	27,240"	LS	102° 40'	49,170"	BT	242070	9713390
67	PBU B.10	2° 35'	19,910"	LS	102° 41'	05,740"	BT	242581	9713616
68	PBU B.9	2° 35'	13,850"	LS	102° 41'	24,410"	BT	243158	9713803
69	PBU B.8	2° 34'	55,450"	LS	102° 41'	41,280"	BT	243678	9714369
70	PBU B.7	2° 34'	55,160"	LS	102° 42'	02,930"	BT	244347	9714380
71	PBU B.6	2° 35'	01,590"	LS	102° 42'	27,450"	BT	245105	9714183
72	PBU B.5	2° 34'	37,980"	LS	102° 42'	39,410"	BT	245474	9714909
73	PBU B.4	2° 34'	16,280"	LS	102° 42'	48,200"	BT	245744	9715577
74	PBU B.3	2° 33'	55,410"	LS	102° 43'	03,470"	BT	246215	9716219
75	PBU B.2	2° 33'	41,810"	LS	102° 43'	11,280"	BT	246456	9716637
76	PBU B.1	2° 33'	17,330"	LS	102° 43'	21,420"	BT	246768	9717390
77	D.1832	2° 33'	21,100"	LS	102° 43'	30,400"	BT	247045	9717275
78	PBU T 1	2° 33'	32,820"	LS	102° 43'	30,820"	BT	247059	9716915
79	PBU T 2	2° 33'	37,340"	LS	102° 43'	32,260"	BT	247104	9716776
80	PBU T 3	2° 33'	48,160"	LS	102° 43'	35,940"	BT	247218	9716443
81	PBU T 4	2° 34'	03,000"	LS	102° 43'	26,040"	BT	246913	9715987
82	PBU T 5	2° 34'	19,610"	LS	102° 43'	27,110"	BT	246947	9715477
83	PBU T 6	2° 34'	34,490"	LS	102° 43'	30,730"	BT	247060	9715020
84	PBU T 7	2° 34'	46,570"	LS	102° 43'	31,380"	BT	247080	9714648
85	PBU T 8	2° 34'	44,180"	LS	102° 43'	47,050"	BT	247564	9714723
86	PBU T 9	2° 34'	46,060"	LS	102° 44'	01,640"	BT	248015	9714666
87	PBU T 10	2° 34'	45,960"	LS	102° 44'	05,310"	BT	248129	9714669

88	PBU T 10A	2° 34'	40,530"	LS	102° 44'	13,980"	BT	248396	9714836
89	PBU T 11	2° 34'	26,280"	LS	102° 44'	13,920"	BT	248394	9715274
90	PBU T 12	2° 34'	06,260"	LS	102° 44'	30,100"	BT	248893	9715890
91	PBU T 13	2° 33'	49,530"	LS	102° 44'	50,410"	BT	249519	9716405
92	PBU T 13A	2° 33'	40,490"	LS	102° 44'	37,420"	BT	249117	9716683
93	PBU T 14	2° 33'	37,330"	LS	102° 45'	07,340"	BT	250042	9716781
94	PBU T 15	2° 33'	30,680"	LS	102° 45'	29,830"	BT	250737	9716987
95	PBU T 16	2° 33'	27,500"	LS	102° 45'	45,560"	BT	251223	9717085
96	PBU T 17	2° 33'	22,490"	LS	102° 46'	02,650"	BT	251750	9717240
97	PBU T 18	2° 33'	19,330"	LS	102° 46'	23,100"	BT	252382	9717338
98	PBU T 19	2° 33'	14,250"	LS	102° 46'	39,050"	BT	252875	9717495
99	PBU T 20	2° 33'	03,290"	LS	102° 46'	44,470"	BT	253042	9717832
100	PBU T 21	2° 32'	51,580"	LS	102° 46'	53,250"	BT	253312	9718193
101	PBU T 22	2° 32'	48,100"	LS	102° 47'	12,030"	BT	253893	9718301
102	PBU T 23	2° 32'	30,100"	LS	102° 47'	24,680"	BT	254283	9718854
103	PBU T 24	2° 32'	09,820"	LS	102° 47'	38,200"	BT	254699	9719478
104	PBU T 25	2° 31'	53,940"	LS	102° 47'	43,060"	BT	254849	9719966
105	PBU T 26	2° 31'	35,200"	LS	102° 47'	49,400"	BT	255044	9720543
106	PBU T 27	2° 31'	13,910"	LS	102° 47'	34,490"	BT	254582	9721196
107	PBU T 28	2° 31'	05,460"	LS	102° 47'	44,050"	BT	254877	9721456
108	PBU T 29	2° 31'	00,140"	LS	102° 48'	02,970"	BT	255461	9721620
109	PBU T 30	2° 30'	47,860"	LS	102° 48'	30,060"	BT	256298	9721999
110	PBU T 31	2° 30'	23,880"	LS	102° 48'	34,270"	BT	256427	9722736
111	PBU T 32	2° 30'	01,970"	LS	102° 48'	30,290"	BT	256302	9723409
112	PBU T 33	2° 29'	40,170"	LS	102° 48'	42,870"	BT	256690	9724080
113	PBU T 34	2° 29'	07,480"	LS	102° 48'	56,560"	BT	257111	9725085
114	PBU T 35	2° 28'	30,280"	LS	102° 49'	33,880"	BT	258263	9726230
115	PBU T 36	2° 28'	19,210"	LS	102° 49'	48,690"	BT	258720	9726571
116	PBU T 37	2° 27'	56,320"	LS	102° 50'	01,010"	BT	259100	9727275
117	PBU T 38	2° 27'	46,940"	LS	102° 50'	20,130"	BT	259690	9727564
118	PBU T 39	2° 27'	26,110"	LS	102° 50'	27,650"	BT	259921	9728204
119	PBU T 40	2° 27'	18,410"	LS	102° 50'	51,790"	BT	260667	9728442
120	PBU T 41	2° 26'	55,450"	LS	102° 50'	54,760"	BT	260758	9729147
121	PBU T 42	2° 26'	35,100"	LS	102° 50'	58,160"	BT	260862	9729773
122	PBU T 43	2° 26'	24,760"	LS	102° 51'	20,640"	BT	261556	9730092
123	PBU T 44	2° 26'	02,720"	LS	102° 51'	39,210"	BT	262129	9730770
124	PBU T 45	2° 26'	03,280"	LS	102° 51'	53,750"	BT	262578	9730753
125	PBU T 46	2° 25'	46,060"	LS	102° 52'	08,270"	BT	263026	9731283
126	PBU T 47	2° 25'	29,850"	LS	102° 52'	18,840"	BT	263352	9731782
127	PBU T 48	2° 25'	27,660"	LS	102° 52'	45,290"	BT	264169	9731850
128	PBU T 49	2° 24'	54,610"	LS	102° 52'	28,710"	BT	263655	9732865
129	PBU T 50	2° 24'	18,680"	LS	102° 52'	08,830"	BT	263039	9733968
130	PBU T 51	2° 23'	51,750"	LS	102° 52'	01,730"	BT	262818	9734795
131	PBU T 52	2° 24'	00,320"	LS	102° 51'	37,480"	BT	262069	9734530
132	PBU T 53	2° 23'	50,640"	LS	102° 51'	08,670"	BT	261178	9734826
133	PBU T 54	2° 23'	28,850"	LS	102° 50'	48,080"	BT	260541	9735495
134	PBU T 55	2° 23'	16,020"	LS	102° 50'	41,700"	BT	260343	9735889

135	PBU T 56	2° 22'	26,280"	LS	102° 50'	36,700"	BT	260186	9737417
136	PBU T 57	2° 22'	12,880"	LS	102° 51'	11,520"	BT	261262	9737830
137	PBU T 58	2° 21'	29,590"	LS	102° 51'	07,680"	BT	261141	9739160
138	PBU T 59	2° 21'	00,340"	LS	102° 50'	54,350"	BT	260728	9740058
139	PBU T 60	2° 20'	45,970"	LS	102° 51'	05,850"	BT	261083	9740500
140	PBU T 61	2° 20'	32,600"	LS	102° 51'	35,980"	BT	262013	9740912
141	PBU T 62	2° 20'	00,730"	LS	102° 51'	21,370"	BT	261560	9741891
142	PBU T 63	2° 19'	54,820"	LS	102° 51'	54,750"	BT	262591	9742074
143	PBU T 64	2° 19'	22,780"	LS	102° 51'	52,210"	BT	262511	9743058
144	PBU T 65	2° 19'	39,280"	LS	102° 52'	12,040"	BT	263125	9742552
145	PBU T 66	2° 18'	52,260"	LS	102° 52'	03,150"	BT	262848	9743997
146	PBU T 67	2° 19'	14,100"	LS	102° 52'	38,330"	BT	263936	9743327
147	PBU T 68	2° 19'	28,400"	LS	102° 52'	39,420"	BT	263971	9742888
148	PBU T 69	2° 19'	02,420"	LS	102° 53'	33,970"	BT	265655	9743689
149	PBU T 70	2° 19'	22,240"	LS	102° 54'	03,970"	BT	266584	9743081
150	PBU T 71	2° 19'	28,360"	LS	102° 54'	39,630"	BT	267686	9742895
151	PBU T 72	2° 19'	57,050"	LS	102° 54'	54,130"	BT	268135	9742014
152	PBU T 73	2° 19'	55,750"	LS	102° 55'	25,440"	BT	269103	9742055
153	PBU T 74	2° 19'	36,760"	LS	102° 55'	43,040"	BT	269646	9742640
154	PBU T 75	2° 19'	50,150"	LS	102° 55'	58,640"	BT	270129	9742229
155	PBU T 76	2° 20'	10,240"	LS	102° 56'	26,570"	BT	270993	9741613
156	PBU T 77	2° 19'	59,630"	LS	102° 56'	56,800"	BT	271926	9741940
157	PBU T 78	2° 20'	06,332"	LS	102° 57'	16,890"	BT	272548	9741735
158	PBU T 79	2° 20'	08,510"	LS	102° 57'	48,720"	BT	273531	9741670
159	PBU T 80	2° 19'	48,800"	LS	102° 58'	20,430"	BT	274510	9742277
160	PBU T 81	2° 19'	55,110"	LS	102° 58'	53,760"	BT	275541	9742084
161	PBU T 82	2° 20'	22,290"	LS	102° 59'	23,080"	BT	276448	9741251
162	PBU T 83	2° 20'	22,280"	LS	102° 59'	51,500"	BT	277326	9741252
163	PBU T 84	2° 20'	24,870"	LS	103° 00'	16,820"	BT	278109	9741174
164	PBU T 85	2° 20'	28,270"	LS	103° 00'	42,130"	BT	278891	9741070
165	PBU T 86	2° 20'	28,570"	LS	103° 01'	13,210"	BT	279852	9741063
166	PBU T 87	2° 20'	29,850"	LS	103° 01'	45,572"	BT	280852	9741025

DAFTAR PILAR BATAS RIAU-JAMBI

**DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU DENGAN
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 33 Tahun 2013)**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS						KOORDINAT UTM	
		LINTANG			BUJUR			X	Y
1	PBU 001	0° 45'	6"	LS	103° 26'	10"	BT	325971	9916887
2	PBU 002	0° 46'	41"	LS	103° 26'	14"	BT	326096	9913969
3	PBU 003	0° 46'	12"	LS	103° 24'	32"	BT	322942	9914859
4	PBU 004	0° 46'	42,8"	LS	103° 24'	6,1"	BT	322142	9913912
5	PBU 005	0° 47'	14"	LS	103° 23'	32"	BT	321088	9912954
6	PBU 006	0° 47'	39,001"	LS	103° 22'	7,799"	BT	318485	9912185
7	PBU 007	0° 47'	53"	LS	103° 21'	23"	BT	317100	9911754
8	PBU 008	0° 47'	57"	LS	103° 21'	10"	BT	316698	9911631
9	PBU 009	0° 46'	45"	LS	103° 20'	47"	BT	315986	9913843
10	PBU 010	0° 46'	34,2"	LS	103° 19'	49,2"	BT	314198	9914174
11	PBU 011	0° 45'	53,88"	LS	103° 18'	44,92"	BT	312210	9915411
12	PBU 012	0° 46'	37,8"	LS	103° 17'	41,84"	BT	310260	9914061
13	PBU 013	0° 46'	12,961"	LS	103° 16'	6,722"	BT	307319	9914823
14	PBU 014	0° 46'	20,759"	LS	103° 15'	38,52"	BT	306447	9914583
15	PBU 015	0° 46'	14,16"	LS	103° 14'	22,08"	BT	304083	9914785
16	PBU 016	0° 45'	53,82"	LS	103° 13'	21,24"	BT	302202	9915409
17	PBU 017	0° 45'	25,4"	LS	103° 12'	29,7"	BT	300608	9916281
18	PBU 018	0° 45'	25,1"	LS	103° 11'	28,8"	BT	298724	9916290
19	PBU 019	0° 45'	11,7"	LS	103° 10'	11,3"	BT	296328	9916700
20	PBU 020	0° 44'	58,4"	LS	103° 8'	26"	BT	293071	9917108
21	PBU 021	0° 44'	47,8"	LS	103° 6'	42,6"	BT	289874	9917432
22	PBU 022	0° 44'	47,8"	LS	103° 6'	42,6"	BT	289874	9917432
23	PBU 023	0° 45'	16,3"	LS	103° 6'	7,7"	BT	288795	9916556
24	PBU 024	0° 45'	43,6"	LS	103° 4'	51,3"	BT	286433	9915716
25	PBU 025	0° 45'	37,2"	LS	103° 4'	10,7"	BT	285177	9915912
26	PBU 026	0° 45'	31,1"	LS	103° 3'	32"	BT	283980	9916099
27	PBU 027	0° 45'	20,5"	LS	103° 2'	42,3"	BT	282443	9916424
28	PBU 028	0° 45'	16,5"	LS	103° 1'	43,3"	BT	280618	9916546
29	PBU 029	0° 45'	19,78"	LS	103° 2'	44,89"	BT	282523	9916446
30	PBU 030	0° 45'	19,02"	LS	103° 2'	4,11"	BT	281262	9916469
31	PBU 031	0° 45'	18,63"	LS	103° 1'	30,68"	BT	280228	9916480
32	PBU 032	0° 45'	17,88"	LS	103° 0'	51,37"	BT	279012	9916503
33	PBU 033	0° 45'	17,49"	LS	103° 0'	13,89"	BT	277853	9916514
34	PBU 034	0° 45'	51,45"	LS	102° 59'	48,53"	BT	277069	9915471
35	PBU 035	0° 46'	24,22"	LS	102° 59'	25,26"	BT	276350	9914464
36	PBU 036	0° 46'	50,32"	LS	102° 59'	9,6"	BT	275866	9913662

37	PBU 037	0° 47'	17,217"	LS	102° 58'	51,106"	BT	275295	9912835
38	PBU 038	0° 47'	44,33"	LS	102° 58'	31,95"	BT	274703	9912002
39	PBU 039	0° 48'	11,27"	LS	102° 58'	13,93"	BT	274146	9911174
40	PBU 040	0° 48'	42,66"	LS	102° 57'	51,39"	BT	273449	9910209
41	PBU 041	0° 49'	13,3"	LS	102° 57'	31,17"	BT	272825	9909267
42	PBU 042	0° 49'	39,13"	LS	102° 57'	13,89"	BT	272291	9908474
43	PBU 043	0° 50'	3,86"	LS	102° 56'	55,87"	BT	271734	9907714
44	PBU 044	0° 50'	34,42"	LS	102° 56'	35,19"	BT	271095	9906774
45	PBU 045	0° 51'	6,17"	LS	102° 56'	15,33"	BT	270481	9905799
46	PBU 046	0° 51'	33,85"	LS	102° 55'	57,68"	BT	269935	9904948
47	PBU 047	0° 51'	58,51"	LS	102° 55'	40,65"	BT	269409	9904190
48	PBU 048	0° 52'	28,03"	LS	102° 55'	7,57"	BT	268387	9903282
49	PBU 049	0° 52'	44,64"	LS	102° 54'	51,4"	BT	267887	9902772
50	PBU 050	0° 53'	11"	LS	102° 54'	21"	BT	266947	9901961
51	PBU 051	0° 53'	31,41"	LS	102° 53'	57,2"	BT	266211	9901334
52	PBU 052	0° 53'	55,39"	LS	102° 53'	35,14"	BT	265530	9900597
53	PBU 053	0° 54'	30,44"	LS	102° 52'	51,04"	BT	264166	9899519
54	PBU 054	0° 54'	51,85"	LS	102° 52'	27,88"	BT	263450	9898861
55	PBU 055	0° 55'	15,37"	LS	102° 52'	2,7"	BT	262672	9898138
56	PBU 056	0° 55'	40,83"	LS	102° 51'	36,24"	BT	261854	9897355
57	PBU 057	0° 56'	6,66"	LS	102° 51'	1,69"	BT	260786	9896561
58	PBU 058	0° 56'	17,36"	LS	102° 50'	45,89"	BT	260298	9896232
59	PBU 059	0° 56'	39,12"	LS	102° 50'	17,22"	BT	259411	9895563
60	PBU 060	0° 56'	39,12"	LS	102° 50'	17,22"	BT	259411	9895563
61	PBU 061	0° 57'	11,34"	LS	102° 49'	33,1"	BT	258048	9894572
61	PBU 062	0° 57'	39,90"	LS	102° 48'	44,80"	BT	256554	9893693
62	PBU 063	0° 57'	46,1"	LS	102° 48'	34,29"	BT	256229	9893503
63	PBU 064	0° 57'	59,21"	LS	102° 48'	6,19"	BT	255361	9893099
64	PBU 065	0° 58'	19,55"	LS	102° 47'	38,09"	BT	254492	9892474
65	PBU 066	0° 58'	50,75"	LS	102° 47'	6,04"	BT	253501	9891514
66	PBU 067	0° 57'	39,9"	LS	102° 48'	44,8"	BT	256554	9893693
67	PBU 068	0° 58'	5,1"	LS	102° 47'	50,9"	BT	254888	9892918
68	PBU 069	0° 59'	4,4"	LS	102° 47'	3,9"	BT	253435	9891095
69	PBU 070	0° 59'	42,4"	LS	102° 46'	44,6"	BT	252839	9889927
70	PBU 071	0° 0'	49"	LS	102° 46'	13"	BT	251863	9887880
71	PBU 072	1° 1'	48"	LS	102° 46'	56"	BT	253194	9886068
72	PBU 073	1° 1'	48"	LS	102° 45'	60"	BT	251462	9886067
73	PBU 074	1° 1'	21"	LS	102° 45'	20"	BT	250225	9886896
74	PBU 075	1° 2'	6"	LS	102° 44'	58"	BT	249545	9885512
75	PBU 076	1° 2'	41"	LS	102° 44'	50"	BT	249299	9884437
76	PBU 077	1° 2'	59"	LS	102° 43'	54"	BT	247567	9883882
77	PBU 078	1° 4'	6"	LS	102° 43'	44"	BT	247259	9881824
78	PBU 079	1° 4'	48"	LS	102° 43'	38"	BT	247075	9880533
79	PBU 080	1° 4'	30"	LS	102° 42'	17"	BT	244569	9881084
80	PBU 081	1° 4'	53"	LS	102° 42'	0"	BT	244044	9880377
81	PBU 082	1° 4'	55"	LS	102° 40'	52"	BT	241941	9880314
82	PBU 083	1° 5'	48"	LS	102° 40'	42"	BT	241632	9878685

83	PBU 084	1° 6' 6"	LS	102° 40' 3"	BT	240427	9878131
84	PBU 085	1° 6' 27"	LS	102° 39' 50"	BT	240025	9877485
85	PBU 086	1° 6' 57"	LS	102° 39' 22"	BT	239160	9876563
86	PBU 087	1° 7' 9"	LS	102° 38' 37"	BT	237768	9876193
87	PBU 088	1° 7' 37"	LS	102° 38' 38"	BT	237800	9875333
88	PBU 089	1° 7' 5"	LS	102° 37' 54"	BT	236438	9876315

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU DENGAN KAB. TEBO PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 33 Tahun 2013)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	PBU 089	1°	7' 5"	LS	102° 37' 54"	BT	236438 9876315
2	PBU 090	1°	6' 17"	LS	102° 37' 30"	BT	235695 9877789
3	PBU 091	1°	5' 52"	LS	102° 36' 24"	BT	233653 9878556
4	PBU 092	1°	5' 44"	LS	102° 35' 10"	BT	231363 9878800
5	PBU 093	1°	6' 4"	LS	102° 34' 9"	BT	229477 9878184
6	PBU 094	1°	6' 14"	LS	102° 32' 58"	BT	227281 9877875
7	PBU 095	1°	5' 13"	LS	102° 32' 31"	BT	226444 9879748
8	PBU 096	1°	5' 48"	LS	102° 31' 51"	BT	225208 9878672

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU DENGAN KAB. TEBO PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 33 Tahun 2013)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS							KOORDINAT UTM		
		LINTANG				BUJUR			X	Y	
1	PBU 096	1°	5'	48"	LS	102°	31'	51"	BT	225208	9878672
2	PBU 097	1°	5'	23,033"	LS	102°	31'	15"	BT	224094	9879438
3	PBU 098	1°	5'	1"	LS	102°	30'	31"	BT	222732	9880114
4	PBU 099	1°	5'	22"	LS	102°	29'	28"	BT	220784	9879467
5	PBU 100	1°	5'	1"	LS	102°	28'	18"	BT	218618	9880111
6	PBU 101	1°	3'	13"	LS	102°	27'	43"	BT	217532	9883429
7	PBU 102	1°	2'	41"	LS	102°	27'	2"	BT	216263	9884412
8	PBU 103	1°	1'	51"	LS	102°	26'	24"	BT	215087	9885947
9	PBU 104	1°	2'	7"	LS	102°	24'	59"	BT	212457	9885453
10	PBU 105	1°	2'	5"	LS	102°	23'	45"	BT	210168	9885513
11	PBU 106	1°	2'	17"	LS	102°	23'	4"	BT	208900	9885143
12	PBU 107	1°	1'	59"	LS	102°	22'	25"	BT	207693	9885695
13	PBU 108	1°	1'	4"	LS	102°	22'	24"	BT	207661	9887386
14	PBU 109	1°	0'	27"	LS	102°	22'	35"	BT	208000	9888523
15	PBU 110	1°	59'	37,98"	LS	102°	22'	59,6"	BT	208760	9890030
16	PBU 111	0°	59'	3,26"	LS	102°	22'	10,83"	BT	207250	9891096
17	PBU 112	0°	58'	14,78"	LS	102°	21'	6,31"	BT	205253	9892585
18	PBU 113	0°	57'	43,73"	LS	102°	20'	43,51"	BT	204547	9893539
19	PBU 114	0°	57'	53,07"	LS	102°	19'	47,95"	BT	202828	9893250
20	PBU 115	0°	57'	16,57"	LS	102°	19'	21,39"	BT	202005	9894372
21	PBU 116	0°	56'	26,66"	LS	102°	18'	53,44"	BT	201139	9895905
22	PBU 117	0°	55'	23,75"	LS	102°	18'	29,58"	BT	200399	9897838
23	PBU 118	0°	55'	3,64"	LS	102°	17'	24,88"	BT	198397	9898455
24	PBU 119	0°	55'	27,7"	LS	102°	15'	44,8"	BT	195301	9897713
25	PBU 120	0°	55'	52,4"	LS	102°	14'	29,1"	BT	192959	9896952
26	PBU 121	0°	56'	46,7"	LS	102°	13'	17,2"	BT	190736	9895281
27	PBU 122	0°	56'	42,4"	LS	102°	11'	25"	BT	187264	9895410
28	PBU 123	0°	55'	52,9"	LS	102°	11'	27,9"	BT	187353	9896932
29	PBU 124	0°	55'	1,3"	LS	102°	11'	17,1"	BT	187017	9898518
30	PBU 125	0°	55'	2,1"	LS	102°	10'	29,4"	BT	185541	9898492
31	PBU 126	0°	54'	40,08"	LS	102°	10'	30"	BT	185559	9899169
32	PBU 127	0°	54'	15,24"	LS	102°	10'	8,88"	BT	184905	9899932
33	PBU 128	0°	54'	2,52"	LS	102°	10'	6,78"	BT	184840	9900323
34	PBU 129	0°	54'	17,58"	LS	102°	9'	25,74"	BT	183570	9899859
35	PBU 130	0°	53'	57,06"	LS	102°	8'	41,1"	BT	182188	9900489
36	PBU 131	0°	54'	48,9"	LS	102°	8'	15,66"	BT	181402	9898895
37	PBU 132	0°	55'	16,32"	LS	102°	7'	2,28"	BT	179132	9898050
38	PBU 133	0°	53'	58,02"	LS	102°	4'	43,04"	BT	174822	9900453

39	PBU 134	0° 53' 27,72"	LS	102° 3' 41,74"	BT	172924	9901383
40	PBU 135	0° 54' 1,96"	LS	102° 2' 54,12"	BT	171451	9900330
41	PBU 136	0° 53' 38,16"	LS	102° 1' 54,78"	BT	169614	9901060
42	PBU 137	0° 53' 9,46"	LS	102° 1' 25,74"	BT	168714	9901941
43	PBU 138	0° 52' 40,44"	LS	102° 0' 43,38"	BT	167403	9902833
44	PBU 139	0° 53' 5,52"	LS	101° 59' 47,6"	BT	833555	9902061
45	PBU 140	0° 52' 52,5"	LS	101° 59' 10,1"	BT	832395	9902462
46	PBU 141	0° 53' 38,14"	LS	101° 58' 45,29"	BT	831626	9901059
47	PBU 142	0° 54' 5,04"	LS	101° 58' 15,23"	BT	830695	9900233
48	PBU 143	0° 55' 1,96"	LS	101° 57' 40,39"	BT	829616	9898484
49	PBU 144	0° 54' 43,38"	LS	101° 57' 9,55"	BT	828662	9899056
50	PBU 145	0° 54' 28,74"	LS	101° 56' 48,11"	BT	827998	9899507
51	PBU 146	0° 54' 54,56"	LS	101° 56' 16,16"	BT	827009	9898714
52	PBU 147	0° 54' 39,86"	LS	101° 55' 53,43"	BT	826306	9899166
53	PBU 148	0° 54' 55,46"	LS	101° 55' 36,89"	BT	825794	9898687

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU DENGAN KAB. TEBO PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 33 Tahun 2013)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	PBU 148	0° 54' 55,46" LS	101° 55' 36,89" BT	825794	9898687
2	PBU 149	0° 55' 9,94" LS	101° 55' 17,29" BT	825187	9898242
3	PBU 150	0° 56' 2,91" LS	101° 54' 58,74" BT	824611	9896614
4	PBU 151	0° 56' 22,27" LS	101° 54' 57,15" BT	824562	9896019
5	PBU 152	0° 56' 29,99" LS	101° 54' 35,46" BT	823890	9895782
6	PBU 153	0° 56' 51,39" LS	101° 54' 34,08" BT	823847	9895125
7	PBU 154	0° 56' 58,88" LS	101° 54' 35,96" BT	823905	9894894
8	PBU 155	0° 57' 9,65" LS	101° 54' 28,68" BT	823679	9894563
9	PBU 156	0° 57' 14,98" LS	101° 54' 7,28" BT	823017	9894400
10	PBU 157	0° 57' 17,97" LS	101° 53' 55,36" BT	822648	9894309
11	PBU 158	0° 57' 24,83" LS	101° 53' 43,28" BT	822274	9894098
12	PBU 159	0° 57' 33,6" LS	101° 53' 42,09" BT	822237	9893828
13	PBU 160	0° 57' 44,92" LS	101° 53' 34,6" BT	822005	9893481
14	PBU 161	0° 58' 5,48" LS	101° 52' 57,8" BT	820866	9892849
15	PBU 162	0° 58' 3,85" LS	101° 52' 36,91" BT	820219	9892900
16	PBU 163	0° 58' 2,44" LS	101° 51' 32" BT	818211	9892945
17	PBU 164	0° 58' 4,96" LS	101° 51' 18,08" BT	817780	9892868
18	PBU 165	0° 58' 9,61" LS	101° 51' 14,56" BT	817671	9892725
19	PBU 166	0° 58' 19,22" LS	101° 51' 11,7" BT	817582	9892430
20	PBU 167	0° 58' 36,73" LS	101° 51' 10,2" BT	817535	9891892
21	PBU 168	0° 58' 50,94" LS	101° 51' 5,34" BT	817385	9891455
22	PBU 169	0° 59' 1" LS	101° 50' 43" BT	816693	9891146
23	PBU 170	0° 58' 59,53" LS	101° 49' 56,75" BT	815262	9891193
24	PBU 171	0° 58' 53,05" LS	101° 49' 48,2" BT	814997	9891392
25	PBU 172	0° 58' 52,08" LS	101° 49' 38,86" BT	814709	9891422
26	PBU 173	0° 58' 41,68" LS	101° 49' 29,74" BT	814427	9891742
27	PBU 174	0° 58' 39,4" LS	101° 49' 24,9" BT	814277	9891812

DAFTAR PILAR BATAS SUMBAR-JAMBI

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH KAB. DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KAB. BUNGO PROVINSI JAMBI (Permendagri Nomor 70 Tahun 2018)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	PBU 1	1° 41' 44,811" LS	101° 26' 15,001" BT	771197	9812394
2	TK 9	1° 40' 51,402" LS	101° 30' 01,635" BT	778208	9814026
3	TK 8	1° 37' 21,894" LS	101° 31' 56,840" BT	781779	9820461
4	TK 7	1° 34' 45,327" LS	101° 34' 03,295" BT	785696	9825268
5	TK 6	1° 33' 33,685" LS	101° 36' 46,265" BT	790739	9827463
6	TK 5	1° 31' 17,219" LS	101° 39' 01,332" BT	794922	9831652
7	PBU-013	1° 29' 41,899" LS	101° 41' 14,798" BT	799054	9834577
8	PBU-012	1° 26' 49,402" LS	101° 42' 23,900" BT	801198	9839877
9	TK 700 Perhentian Teleng	1° 25' 52,100" LS	101° 43' 05,200" BT	802478	9841637
10	TK 702 Muaro Danau Ikan Hijau	1° 25' 36,200" LS	101° 42' 43,600" BT	801810	9842126
11	TK 703 Muaro Sungai Tutung	1° 25' 18,800" LS	101° 42' 42,400" BT	801774	9842661
12	TK 579 Lubuk Ipuh	1° 24' 55,800" LS	101° 42' 13,900" BT	800893	9843369
13	PBU-011	1° 24' 29,801" LS	101° 41' 44,902" BT	799997	9844169
14	TK 575 Pematang Ubah	1° 24' 27,500" LS	101° 41' 39,100" BT	799818	9844240
15	PBU-010	1° 23' 48,998" LS	101° 41' 46,298" BT	800042	9845423
16	TK 578 Ulu Sungai Sirih	1° 22' 38,700" LS	101° 42' 50,700" BT	802036	9847582
17	TK 577 Lubuk Surim	1° 22' 30,500" LS	101° 42' 46,500" BT	801907	9847834
18	TK 570 R Rw Suto	1° 21' 18,500" LS	101° 43' 28,600" BT	803212	9850046
19	PBU-009	1° 21' 13,601" LS	101° 43' 39,400" BT	803546	9850196
20	TK Lubuk Sibodi	1° 20' 16,500" LS	101° 42' 56,400" BT	802218	9851952
21	TK 567 Sungai Panual	1° 21' 03,500" LS	101° 40' 46,800" BT	798207	9850512
22	PBU-008	1° 21' 02,300" LS	101° 40' 47,201" BT	798219	9850549
23	TK 564 Tembulun Tinggi Panua	1° 20' 09,900" LS	101° 40' 20,300" BT	797389	9852161
24	TK 563 Meranti Rimbo Terang	1° 19' 39,300" LS	101° 40' 57,600" BT	798544	9853100
25	TK 560 Tembulun Tinggi Pangian	1° 17' 56,800" LS	101° 41' 19,100" BT	799212	9856250
26	PBU-007	1° 17' 55,601" LS	101° 41' 20,800" BT	799265	9856286
27	TK 558 Lesung Lago Tigo	1° 16' 52,100" LS	101° 41' 30,000" BT	799552	9858238
28	TK 557 Kelambu Resam	1° 16' 19,200" LS	101° 42' 01,300" BT	800521	9859248
29	PBU-006	1° 16' 15,600" LS	101° 42' 02,401" BT	800555	9859359
30	TK 615	1° 16' 07,300" LS	101° 42' 06,600" BT	800685	9859614
31	TK 616	1° 16' 07,200" LS	101° 42' 11,100" BT	800825	9859617

32	TK 617	1° 16' 06,200" LS	101° 42' 11,200" BT	800828	9859648
33	TK 618	1° 16' 03,200" LS	101° 42' 11,200" BT	800828	9859740
34	TK 619	1° 16' 03,000" LS	101° 42' 13,800" BT	800908	9859746
35	TK 620	1° 16' 05,600" LS	101° 42' 14,400" BT	800927	9859666
36	TK 621	1° 16' 06,500" LS	101° 42' 14,300" BT	800924	9859638
37	TK 622	1° 16' 06,500" LS	101° 42' 17,700" BT	801029	9859638
38	TK 623	1° 16' 09,900" LS	101° 42' 17,800" BT	801032	9859534
39	TK 625	1° 16' 12,000" LS	101° 42' 19,600" BT	801087	9859469
40	TK 626	1° 16' 11,200" LS	101° 42' 21,200" BT	801137	9859494
41	TK 627	1° 16' 12,500" LS	101° 42' 20,900" BT	801128	9859454
42	TK 628	1° 16' 13,000" LS	101° 42' 21,700" BT	801152	9859438
43	TK 629	1° 16' 14,500" LS	101° 42' 21,700" BT	801152	9859392
44	TK 630	1° 16' 14,900" LS	101° 42' 23,200" BT	801199	9859380
45	TK 631	1° 16' 13,900" LS	101° 42' 25,000" BT	801254	9859410
46	TK 632	1° 16' 14,300" LS	101° 42' 25,600" BT	801273	9859398
47	TK 633	1° 16' 13,300" LS	101° 42' 27,500" BT	801332	9859429
48	TK 635	1° 16' 09,300" LS	101° 42' 26,200" BT	801292	9859552
49	TK 636	1° 16' 09,200" LS	101° 42' 27,700" BT	801338	9859555
50	TK 637	1° 16' 08,100" LS	101° 42' 28,000" BT	801347	9859589
51	TK 638	1° 16' 07,200" LS	101° 42' 30,300" BT	801419	9859616
52	TK 639	1° 16' 05,400" LS	101° 42' 30,700" BT	801431	9859671
53	PBU-005	1° 16' 03,799" LS	101° 42' 31,702" BT	801462	9859721
54	TK 640	1° 16' 01,900" LS	101° 42' 33,300" BT	801511	9859779
55	TK 643	1° 15' 53,900" LS	101° 42' 33,400" BT	801515	9860025
56	TK 644	1° 15' 55,900" LS	101° 42' 34,400" BT	801546	9859963
57	TK 645	1° 15' 56,200" LS	101° 42' 37,500" BT	801642	9859954
58	TK 646	1° 15' 52,000" LS	101° 42' 37,200" BT	801632	9860083
59	TK 647	1° 15' 49,800" LS	101° 42' 37,300" BT	801636	9860151
60	TK 648	1° 15' 49,600" LS	101° 42' 40,700" BT	801741	9860157
61	TK 649	1° 15' 49,800" LS	101° 42' 41,200" BT	801756	9860151
62	TK 650	1° 15' 50,500" LS	101° 42' 43,700" BT	801834	9860129
63	TK 651	1° 15' 48,800" LS	101° 42' 43,700" BT	801834	9860181
64	TK 652	1° 15' 48,500" LS	101° 42' 44,300" BT	801852	9860191
65	TK 653	1° 15' 47,500" LS	101° 42' 44,600" BT	801862	9860221
66	TK 654	1° 15' 46,100" LS	101° 42' 44,600" BT	801862	9860264
67	TK 655	1° 15' 44,100" LS	101° 42' 45,400" BT	801886	9860326
68	TK 656	1° 15' 43,300" LS	101° 42' 46,200" BT	801911	9860350
69	TK 657	1° 15' 40,400" LS	101° 42' 47,800" BT	801961	9860439
70	PBU-004	1° 15' 38,401" LS	101° 42' 49,702" BT	802020	9860501
71	TK 659	1° 15' 38,100" LS	101° 42' 49,700" BT	802020	9860510
72	TK 660	1° 15' 33,700" LS	101° 42' 50,200" BT	802035	9860645
73	TK 661	1° 15' 30,300" LS	101° 42' 50,200" BT	802035	9860750
74	TK 662	1° 15' 29,900" LS	101° 42' 50,700" BT	802051	9860762
75	TK 663	1° 15' 31,900" LS	101° 42' 53,600" BT	802140	9860700
76	TK 664	1° 15' 33,700" LS	101° 42' 55,100" BT	802187	9860645
77	TK 665	1° 15' 33,500" LS	101° 42' 56,800" BT	802239	9860651
78	TK 666	1° 15' 36,900" LS	101° 42' 57,000" BT	802245	9860547

79	TK 668	1° 15' 36,900" LS	101° 43' 00,000" BT	802338	9860547
80	TK 672	1° 15' 28,000" LS	101° 43' 01,800" BT	802394	9860820
81	TK 673	1° 15' 28,200" LS	101° 43' 02,400" BT	802413	9860814
82	TK 674	1° 15' 24,700" LS	101° 43' 06,300" BT	802534	9860921
83	TK 675	1° 15' 23,100" LS	101° 43' 02,900" BT	802428	9860971
84	TK 680	1° 15' 13,700" LS	101° 43' 02,800" BT	802426	9861260
85	TK 682	1° 15' 10,200" LS	101° 43' 03,500" BT	802447	9861367
86	TK 683	1° 15' 11,700" LS	101° 43' 06,300" BT	802534	9861321
87	TK 684	1° 15' 14,300" LS	101° 43' 06,500" BT	802540	9861241
88	TK 685	1° 15' 14,000" LS	101° 43' 08,700" BT	802608	9861250
89	TK 686	1° 15' 14,300" LS	101° 43' 16,100" BT	802837	9861241
90	TK 688	1° 15' 04,200" LS	101° 43' 15,700" BT	802825	9861551
91	TK 689	1° 14' 55,000" LS	101° 43' 13,900" BT	802770	9861834
92	PBU-003	1° 14' 55,900" LS	101° 43' 00,901" BT	802367	9861807
93	TK 690	1° 14' 54,100" LS	101° 43' 13,400" BT	802754	9861862
94	TK Simp, Kera Sakti	1° 14' 52,500" LS	101° 43' 09,700" BT	802640	9861911
95	TK 692	1° 14' 28,900" LS	101° 43' 20,500" BT	802975	9862636
96	TK Kuburan	1° 13' 58,300" LS	101° 43' 51,000" BT	803919	9863576
97	TK 696	1° 13' 53,600" LS	101° 44' 07,200" BT	804421	9863720
98	PBU-02A	1° 14' 01,500" LS	101° 44' 23,600" BT	804928	9863476
99	TK 4	1° 14' 09,187" LS	101° 44' 41,852" BT	805492	9863239
100	TK 3	1° 13' 47,202" LS	101° 45' 27,878" BT	806917	9863914
101	TK 2	1° 13' 01,910" LS	101° 49' 01,793" BT	813537	9865299
102	TK 1	1° 11' 05,921" LS	101° 50' 30,852" BT	816296	9868862
103	PBU-002	1° 09' 19,800" LS	101° 51' 55,400" BT	818915	9872121
104	PBU-001	1° 08' 05,100" LS	101° 52' 59,700" BT	820907	9874416
105	TK 0	1° 08' 05,025" LS	101° 53' 03,124" BT	821013	9874418

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN
KAB. TEBO PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 71 Tahun 2018)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 0	1° 08' 05,025" LS	101° 53' 03,124" BT	821013	9874418
2	PABU-001	1° 07' 59,100" LS	101° 53' 08,500" BT	821180	9874600
3	PABU 01 A - 2002	1° 07' 49,800" LS	101° 52' 59,580" BT	820904	9874886
4	PABU 02 A - 2002	1° 06' 48,840" LS	101° 53' 02,520" BT	820997	9876760
5	PABU-002	1° 06' 46,700" LS	101° 53' 02,700" BT	821003	9876826
6	PABU-003	1° 06' 33,900" LS	101° 53' 11,000" BT	821260	9877219
7	PABU-03	1° 06' 27,612" LS	101° 53' 29,983" BT	821847	9877412
8	PABU-004	1° 06' 11,600" LS	101° 53' 08,600" BT	821186	9877905
9	PABU 06 A - 2002	1° 06' 48,540" LS	101° 51' 55,140" BT	818912	9876771
10	PBU 08 A - 2002	1° 06' 07,140" LS	101° 50' 42,420" BT	816663	9878046
11	PBU-02	1° 06' 17,967" LS	101° 50' 47,259" BT	816812	9877713
12	TK 5	1° 06' 37,033" LS	101° 50' 13,146" BT	815756	9877128
13	TK 4	1° 06' 38,074" LS	101° 49' 52,550" BT	815119	9877097
14	TK 3	1° 06' 35,391" LS	101° 49' 47,461" BT	814962	9877179
15	TK 2	1° 06' 24,958" LS	101° 49' 45,696" BT	814907	9877500
16	TK 1	1° 06' 17,947" LS	101° 49' 57,243" BT	815265	9877715
17	PBA 07-2005	1° 04' 34,600" LS	101° 49' 36,900" BT	814638	9880893
18	PBU-01	1° 03' 13,433" LS	101° 49' 18,884" BT	814083	9883389
19	PBA 06-2005	1° 02' 18,100" LS	101° 49' 32,300" BT	814500	9885089
20	TK PP14	1° 02' 08,400" LS	101° 49' 23,900" BT	814240	9885388
21	TK PP13	1° 01' 46,200" LS	101° 49' 09,100" BT	813783	9886070
22	TK PP12A	1° 01' 33,100" LS	101° 49' 11,400" BT	813854	9886473
23	TK PP11	1° 01' 23,100" LS	101° 49' 11,900" BT	813870	9886780
24	TK PP12B	1° 01' 11,900" LS	101° 49' 11,400" BT	813855	9887125
25	TK PP10	1° 01' 03,700" LS	101° 49' 17,800" BT	814053	9887377
26	TK PP9	1° 00' 47,800" LS	101° 49' 13,900" BT	813933	9887866
27	PBA 05-2005	1° 00' 26,500" LS	101° 49' 23,600" BT	814234	9888520
28	TK PP8	1° 00' 26,100" LS	101° 49' 23,200" BT	814221	9888532
29	TK PP7	1° 00' 10,700" LS	101° 49' 06,100" BT	813693	9889006
30	TK PP6	1° 00' 05,600" LS	101° 48' 54,700" BT	813340	9889163
31	TK PP5	0° 59' 53,100" LS	101° 48' 59,000" BT	813473	9889547
32	PBA 04-2005	0° 59' 52,700" LS	101° 49' 02,400" BT	813579	9889560
33	TK 3	0° 59' 34,718" LS	101° 49' 03,620" BT	813617	9890112

34	PBA 03-2005	0° 59' 34,800" LS	101° 49' 06,500" BT	813706	9890110
35	TK 2	0° 59' 30,326" LS	101° 49' 15,724" BT	813991	9890247
36	TK 1	0° 59' 00,289" LS	101° 49' 15,665" BT	813990	9891170
37	PBA 02-2005	0° 59' 02,000" LS	101° 49' 18,900" BT	814090	9891118
38	TK PP1	0° 58' 47,100" LS	101° 49' 21,900" BT	814184	9891576
39	PBA 01-2005	0° 58' 49,800" LS	101° 49' 22,600" BT	814205	9891493
40	PBU 174	0° 58' 39,400" LS	101° 49' 24,900" BT	814277	9891812

**DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN
KAB. KERINCI PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 72 Tahun 2018)**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	PBU.46-2004	1° 40' 39,130" LS	101° 25' 35,870" BT	737154	9813658
2	TK 3	1° 40' 57,574" LS	101° 25' 51,043" BT	737154	9813658
3	TK 2	1° 41' 12,792" LS	101° 25' 54,670" BT	737154	9813658
4	TK 1	1° 41' 31,466" LS	101° 26' 05,456" BT	737154	9813658
5	PBU 1	1° 41' 44,811" LS	101° 26' 15,001" BT	737154	9813658

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN
KAB. KERINCI PROVINSI JAMBI (SUB SEGMENT BAGIAN SELATAN)
(Permendagri Nomor 73 Tahun 2018)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS						KOORDINAT UTM	
		LINTANG			BUJUR			X	Y
1	D 1830	2° 17'	19,200"	LS	101° 17'	34,330"	BT	755005	9746828
2	TB 22	2° 16'	36,350"	LS	101° 17'	10,040"	BT	754256	9748146
3	PBA 15	2° 15'	45,660"	LS	101° 16'	51,600"	BT	753689	9749705
4	TK 01	2° 15'	03,600"	LS	101° 16'	47,000"	BT	753549	9750997

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN
KAB. KERINCI PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 72 Tahun 2018)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	PBU 41	1° 41'	04,990" LS	101° 07'	54,000" BT	737154	9813658
2	PBU 42	1° 41'	08,988" LS	101° 08'	21,987" BT	737154	9813658
3	PBU 43	1° 41'	38,994" LS	101° 08'	59,011" BT	737154	9813658
4	PBU 44	1° 41'	56,991" LS	101° 09'	20,985" BT	737154	9813658
5	PBU 44-2005	1° 42'	27,000" LS	101° 09'	39,000" BT	737154	9813658
6	PBU 45	1° 42'	35,000" LS	101° 10'	03,000" BT	737154	9813658
7	TK 01	1° 42'	38,178" LS	101° 10'	09,038" BT	737154	9813658
8	PBU 46	1° 42'	17,000" LS	101° 10'	29,000" BT	737154	9813658
9	PBU 47	1° 41'	52,000" LS	101° 10'	48,000" BT	737154	9813658
10	PBU 48	1° 41'	21,000" LS	101° 10'	57,000" BT	737154	9813658
11	PBU 49	1° 40'	51,020" LS	101° 11'	11,000" BT	737154	9813658
12	TK 02	1° 40'	33,667" LS	101° 11'	27,640" BT	737154	9813658
13	PBU 50	1° 40'	45,000" LS	101° 11'	31,000" BT	737154	9813658
14	PBU 51	1° 41'	18,000" LS	101° 11'	41,000" BT	737154	9813658
15	PBU 52	1° 41'	47,000" LS	101° 11'	40,000" BT	737154	9813658
16	PBU 53	1° 42'	21,000" LS	101° 11'	46,000" BT	737154	9813658
17	PBU 54	1° 42'	53,000" LS	101° 12'	00,000" BT	737154	9813658
18	TK 03	1° 43'	00,380" LS	101° 12'	19,889" BT	737154	9813658
19	PBU 55	1° 43'	14,000" LS	101° 12'	25,000" BT	737154	9813658
20	PBU 56	1° 43'	28,000" LS	101° 12'	53,000" BT	737154	9813658
21	PBU 57	1° 43'	14,000" LS	101° 13'	22,000" BT	737154	9813658
22	TK 04	1° 43'	06,261" LS	101° 13'	34,443" BT	737154	9813658
23	PBU 58	1° 43'	25,000" LS	101° 13'	42,000" BT	737154	9813658
24	PBU.01-2005	1° 43'	21,930" LS	101° 14'	09,740" BT	737154	9813658
25	PBU.02-2005	1° 43'	09,250" LS	101° 14'	39,980" BT	737154	9813658
26	PBU.03-2005	1° 42'	49,800" LS	101° 15'	10,370" BT	737154	9813658
27	TK SBJ 2	1° 41'	42,020" LS	101° 19'	06,560" BT	737154	9813658
28	TK SBJ 3	1° 41'	33,930" LS	101° 19'	56,390" BT	737154	9813658
29	TK 05	1° 41'	27,900" LS	101° 19'	57,700" BT	737154	9813658
30	TK 06	1° 41'	07,500" LS	101° 19'	51,900" BT	737154	9813658
31	TK SBJ 1	1° 41'	02,230" LS	101° 19'	59,950" BT	737154	9813658
32	PBU.55-2004	1° 40'	50,540" LS	101° 20'	11,410" BT	737154	9813658
33	PBA.54-2004	1° 40'	53,900" LS	101° 20'	34,100" BT	737154	9813658
34	PBA.53-2004	1° 40'	47,600" LS	101° 21'	01,300" BT	737154	9813658

35	PBA.52-2004	1° 40'	45,700"	LS	101° 21'	20,400"	BT	737154	9813658
36	PBA.51-2004	1° 40'	30,980"	LS	101° 22'	23,480"	BT	737154	9813658
37	PBU.50-2004	1° 41'	05,220"	LS	101° 22'	59,350"	BT	737154	9813658
38	PBA.49-2004	1° 41'	23,910"	LS	101° 23'	43,370"	BT	737154	9813658
39	PBA.48-2004	1° 40'	47,280"	LS	101° 24'	09,450"	BT	737154	9813658
40	PBA.47-2004	1° 40'	21,190"	LS	101° 24'	42,880"	BT	737154	9813658
41	PBU.46-2004	1° 40'	39,130"	LS	101° 25'	35,870"	BT	737154	9813658

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN
KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
(Permendagri Nomor 73 Tahun 2018)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 01	2° 15' 03,600" LS	101° 16' 47,000" BT	753549	9750997
2	PBA 14	2° 14' 40,440" LS	101° 16' 44,100" BT	753460	9751709
3	PBA 13	2° 13' 37,500" LS	101° 16' 35,340" BT	753192	9753644
4	PBA 12	2° 12' 31,260" LS	101° 16' 27,840" BT	752964	9755679
5	PBU 11	2° 11' 30,300" LS	101° 16' 21,960" BT	752785	9757553
6	PBA 10	2° 10' 24,120" LS	101° 16' 11,820" BT	752474	9759587
7	PBA 09	2° 09' 20,220" LS	101° 16' 04,020" BT	752236	9761551
8	PBA 08	2° 08' 16,620" LS	101° 15' 56,160" BT	751996	9763505
9	PBA 07	2° 07' 38,460" LS	101° 15' 48,360" BT	751757	9764678
10	PBU 06	2° 06' 06,840" LS	101° 15' 39,840" BT	751498	9767494
11	PBA 05	2° 05' 43,380" LS	101° 15' 25,980" BT	751070	9768215
12	PBA 04	2° 05' 51,500" LS	101° 14' 27,800" BT	749271	9767968
13	PBA 03	2° 04' 22,140" LS	101° 14' 37,260" BT	749568	9770714
14	TK 1 - 2015	2° 04' 00,095" LS	101° 14' 22,859" BT	749123	9771392

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN
KAB. KERINCI PROVINSI JAMBI (SUB SEGMENT BAGIAN UTARA)
(Permendagri Nomor 73 Tahun 2018)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1 - 2015	2° 04' 00,095" LS	101° 14' 22,859" BT	749123	9771392
2	PBA 02	2° 03' 27,000" LS	101° 14' 03,360" BT	748522	9772409
3	PBU 01	2° 02' 34,080" LS	101° 13' 31,860" BT	747550	9774037
4	PBU 00	2° 01' 26,000" LS	101° 13' 01,000" BT	746599	9776130
5	PBU 01	2° 00' 57,000" LS	101° 12' 42,000" BT	746013	9777022
6	PBU 02	2° 00' 27,000" LS	101° 12' 24,000" BT	745458	9777944
7	PBU 03	1° 59' 55,000" LS	101° 12' 04,000" BT	744841	9778928
8	PBU 04	1° 59' 26,000" LS	101° 11' 44,000" BT	744224	9779820
9	PBU 05	1° 58' 56,000" LS	101° 11' 25,000" BT	743638	9780743
10	PBU 06	1° 58' 24,000" LS	101° 11' 07,000" BT	743083	9781727
11	PBU 07	1° 57' 55,000" LS	101° 10' 51,000" BT	742589	9782619
12	PBU 08	1° 57' 29,000" LS	101° 10' 31,000" BT	741972	9783418
13	PBU 09	1° 57' 04,000" LS	101° 10' 17,000" BT	741540	9784187
14	PBU 10	1° 56' 44,000" LS	101° 10' 02,000" BT	741077	9784802
15	PBU 11	1° 56' 21,000" LS	101° 09' 46,000" BT	740584	9785509
16	PBU 12	1° 55' 57,000" LS	101° 09' 26,000" BT	739966	9786247
17	PBU 13	1° 55' 24,000" LS	101° 09' 16,000" BT	739658	9787262
18	PBU 14	1° 54' 53,000" LS	101° 08' 54,000" BT	738979	9788215
19	PBU 15	1° 54' 26,000" LS	101° 08' 39,000" BT	738517	9789045
20	PBU 16	1° 53' 56,000" LS	101° 08' 18,000" BT	737869	9789968
21	PBU 17	1° 53' 21,000" LS	101° 08' 16,000" BT	737808	9791043
22	PBU 18	1° 52' 48,000" LS	101° 08' 17,000" BT	737840	9792057
23	PBU 19	1° 52' 20,000" LS	101° 08' 13,000" BT	737718	9792918
24	PBU 20	1° 51' 45,000" LS	101° 08' 10,000" BT	737626	9793993
25	PBU 21	1° 51' 14,000" LS	101° 08' 11,000" BT	737658	9794945
26	PBU 22	1° 50' 39,000" LS	101° 08' 09,000" BT	737598	9796021
27	PBU 23	1° 50' 09,000" LS	101° 08' 09,000" BT	737599	9796943
28	PBU 24	1° 49' 35,000" LS	101° 08' 08,000" BT	737569	9797987
29	PBU 25	1° 48' 59,000" LS	101° 08' 07,000" BT	737540	9799093
30	PBU 26	1° 48' 30,000" LS	101° 08' 05,000" BT	737479	9799985
31	PBU 27	1° 48' 00,000" LS	101° 08' 03,000" BT	737418	9800906
32	PBU 28	1° 47' 59,000" LS	101° 08' 03,003" BT	737418	9800937
33	PBU 29	1° 47' 25,012" LS	101° 07' 53,996" BT	737141	9801982
34	PBU 30	1° 46' 53,007" LS	101° 07' 54,956" BT	737172	9802965
35	PBU 31	1° 46' 21,002" LS	101° 07' 55,010" BT	737175	9803948
36	PBU 32	1° 45' 47,989" LS	101° 07' 52,992" BT	737113	9804963
37	PBU 33	1° 45' 16,016" LS	101° 07' 54,988" BT	737176	9805945
38	PBU 34	1° 44' 43,001" LS	101° 07' 58,989" BT	737301	9806959

39	PBU 35	1° 44' 09,989" LS	101° 07' 52,992" BT	737117	9807974
40	PBU 36	1° 43' 37,008" LS	101° 07' 50,004" BT	737026	9808987
41	PBU 37	1° 43' 05,003" LS	101° 07' 52,000" BT	737088	9809970
42	PBU 38	1° 42' 32,999" LS	101° 07' 50,016" BT	737028	9810954
43	PBU 39	1° 41' 59,984" LS	101° 07' 52,011" BT	737091	9811968
44	PBU 40	1° 41' 28,988" LS	101° 07' 52,001" BT	737092	9812920
45	PBU 41	1° 41' 04,990" LS	101° 07' 54,000" BT	737154	9813658